

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi sekarang ini membuat Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai bentuk layanan ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi memang tidak terlepas dari akan adanya kelalaian atau pelanggaran yang merugikan nasabah. Namun, untuk menghindari kerugian tersebut terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berjalannya prosedur pelaksanaan kegiatan perbankan. Peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya.

Salah satu pelanggaran yang dapat dilakukan pihak bank adalah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian adalah salah satu bentuk perlindungan secara tidak langsung bagi nasabah sebagai bentuk antisipasi terjadinya kerugian nasabah akibat kelalaian yang dilakukan oleh bank yang seharusnya selalu menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatannya. Prinsip ini juga untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan pihak bank serta guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier, termasuk dalam bentuk peraturan, buku dan jurnal, serta kamus. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Kasus mengenai kelalaian bank terkait pencairan dana deposito ini dapat dilihat dalam Kasus Putusan Nomor 559/K/Pdt/2012. Bank Mandiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar pasal-pasal dalam UU Perbankan, UU OJK, dan peraturan perundang-undangan lainnya akibat dari kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pencairan dana deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam Kasus Putusan ini juga Bank Mandiri tidak beritikad baik atas tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya bank bertanggung jawab atas kelalaiannya sebagai wujud perlindungan hukum atas setiap kerugian yang dirasakan oleh nasabahnya dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya harus sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berasaskan pada prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Bank, Prinsip Kehati-hatian, Perbuatan Melawan Hukum*

ABSTRACT

Economic growth now makes banking institutions as one of the financial institutions that have an important role in supporting the economic life. Various forms of services offered by the bank such as credit and savings deposits which can help in the activities in the community economy. But, at the fact that banking activities providing services in sectors of the economy are indeed inseparable from any negligence or a violation to the detriment of the customer. However, to avoid the losses there are various regulations governing the operation of the procedures the implementation of banking activities. These regulations include Act No. 10 year 1998 about the changes to the Act No. 7 of the year 1992 about Banking, Act No. 21 of the year 2011 about OJK, law number 8 of year 1999 on the protection of Consumers and others.

One of the violations can be made the bank is a violation of the principle of prudence. The precautionary principle in one form of indirect protection for customers as a form of anticipation of the occurrence customer losses due to gross negligence committed by the bank that it should always apply this principle in all activities. This principle also to prevent tort law can do the bank as well as to maintain public confidence to towards the bank.

The method used in the juridical normative. The specifications uses are descriptive research analytical. The data used are secondary data which covers the primary law, secondary law, and the tertiary law, included in the form of regulations, books and journals, as well as a dictionary. Secondary data obtained through library study them analyzed by using qualitative methods.

A case about negligence related disbursement of bank deposits can be seem in the case of the ruling Number 559/K/Pdt/2012. Bank Mandiri has done in tort and breach the articles in law, banking regulation, OJK regulation, and other laws and regulations resulting from negligence and violations committed in applying the prudent principle of disbursement of deposits funds owned by the Government of Kabupaten Aceh Utara. In this decision case, Bank Mandiri does not have a good faith in the claim of compensation submitted by Government of Kabupaten Aceh Utara.

Thus, it can be concluded that the bank should be responsible for their negligence as a form of legal protection for any losses to their customers and in carrying out their duties and responsibilities must be in accordance with this legislation rules based on the principle of prudence.

Keywords: Bank Responsibility, Prudential Principles, Unlawful Actions